

PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN FLORES TIMUR 2018



PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN FLORES TIMUR 2018



**PROFIL PENDIDIKAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
2018**

<https://florestimurkab.bps.go.id>

**PROFIL PENDIDIKAN
KABUPATEN FLORES TIMUR 2018**

ISSN : 978-602-5461-31-6
No. Publikasi : 53090.2006
Katalog BPS : 4301003.5309
Ukuran Buku : 21,5 x 27,94 cm
Jumlah Halaman : x + 52

Naskah :
Wisnu Widya Asmara, SST

Gambar Kulit :
Wisnu Widya Asmara, SST

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur

Dicetak oleh : CV. CHRISEVEL

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 adalah publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur. Publikasi ini menggambarkan keadaan pendidikan masyarakat daerah Kabupaten Flores Timur secara umum yang merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 dan sumber lain dari dinas terkait sebagai pelengkap.

Data yang disajikan dalam publikasi ini meliputi partisipasi pendidikan, pembangunan pendidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Flores Timur.

Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, kekurangan dan kesalahan sangat mungkin terjadi, untuk itu tanggapan dan saran-saran dari berbagai pihak kami harapkan demi penyempurnaan penerbitan mendatang.

Larantuka, Maret 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Flores Timur,



= Ir. Kornelis Lonek Ama =
NIP. 19660501199303 1 003

<https://florestimurkab.bps.go.id>

*D
a
f
t
a
r

I
s
i*

I.	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Tujuan	4
1.3	Sistematika Penulisan	4
II.	METODOLOGI	7
2.1	Sumber Data	9
2.2	Teknik Penarikan Sampel	10
2.3	Metode Pengumpulan Data	10
2.4	Pengolahan Data	11
2.5	Konsep Definisi	11
III.	PARTISIPASI PENDIDIKAN	25
3.1	Pendidikan Anak Usia Dini	27
3.2	Tingkat Partisipasi Sekolah	31
3.3	Angka Partisipasi Sekolah	32
3.4	Angka Partisipasi Kasar	34
3.5	Angka Partisipasi Murni	36
IV.	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	37
4.1	Angka Melek Huruf	40
4.2	Rata-rata Lama Sekolah	41
4.3	Harapan Lama Sekolah	43
4.4	Pendidikan Yang Ditamatkan	45
V.	SARANA & PRASARANA PENDIDIKAN	47
5.1	Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Guru	49

*D
a
f
t
a
r

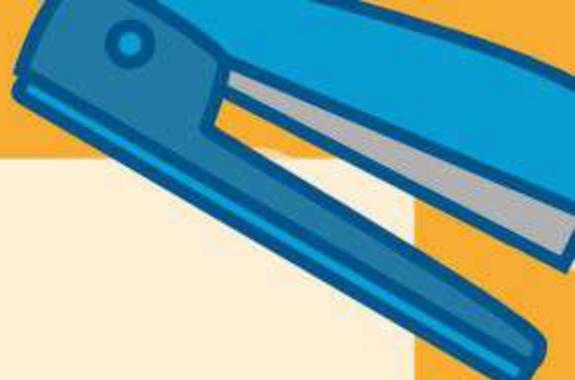
G
a
m
b
a
r*

Gambar 3.1	Persentase penduduk berumur 0-6 tahun menurut partisipasi pra sekolah Tahun 2018	28
Gambar 3.2	Persentase Partisipasi Penduduk yang Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Berumur 0-6 Tahun Menurut Strata Ekonomi Tahun 2018	29
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Umur 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Dan Jenis Kelamin Tahun 2018	31
Gambar 4.1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas Tahun 2013-2018	42
Gambar 4.2	Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2014-2018	44

*D
a
f
t
a
r

T
a
b
e
l*

Tabel 3.1	Persentase Penduduk Umur 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Dan Jenis Kelamin Tahun 2018	30
Tabel 3.2	APS Formal dan Non Formal Penduduk Umur 5-18 Tahun Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin Tahun 2018	32
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin di Flores Timur Tahun 2018	34
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Flores Timur Tahun 2018	36
Tabel 4.1	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Tahun 2018	41
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Umur 7-24 Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2018	46
Tabel 5.1	Jumlah Sekolah, Jumlah Tenaga Pendidik, dan Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018	50
Tabel 5.2	Rasio Pendidik-Sekolah, Rasio Siswa-Sekolah, Dan Rasio Siswa-Pendidik Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018	50



BAB I

PENDAHULUAN

<https://www.stimuluslab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan maju tidaknya suatu daerah. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional lebih rinci dijelaskan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab.

Mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dapat menjadi kunci berkembangnya suatu daerah.. Maju mundurnya suatu daerah ditentukan oleh kreativitas pendidikan daerah itu sendiri dan kompleksnya masalah kehidupan menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mampu berkompetisi. Selain itu pendidikan merupakan wadah kegiatan yang dapat dipandang sebagai pencetak SDM yang bermutu.

Akses pendidikan yang berkualitas menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan dalam lima tahun mendatang. Akses pendidikan menjadi isu besar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019. Komponen kualitas pendidikan menjadi hal yang sangat mendesak dan tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan aksesnya.

Dalam lima tahun terakhir diketahui bahwa kendala terbesar yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah masih kentalnya kesenjangan antar wilayah dalam hal akses. Mulai dari persoalan perbedaan tingkat perkembangan daerah, hingga tingginya perbedaan kualitas pendidikan yang diakses.

Publikasi ini disusun untuk menyajikan berbagai data dan ulasan bidang pendidikan di Kabupaten Flores Timur dari hasil Susenas tahun 2018 dan instansi terkait sebagai pelengkap. Untuk memudahkan pembaca, publikasi ini juga dilengkapi dengan definisi operasional yang digunakan dalam pengumpulan data dan metodologi pengumpulan data pada Susenas 2018.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi "Profil Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018" adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai pendidikan penduduk di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2018, untuk membantu dalam penentuan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, serta mengevaluasi keberhasilan pembangunan dari sisi pendidikan di wilayah Kabupaten Flores Timur.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyajian Uraian singkat dan tabel yang disajikan dalam publikasi ini sebagian besar dalam bentuk angka persentase. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengguna data dalam membaca dan membandingkan isinya. Publikasi ini menyajikan mengenai gambaran secara umum tentang pendidikan penduduk di Kabupaten Flores Timur, dengan berpedoman pada

Profil Pendidikan Kabupaten Flores Timur 2018

konsep dan definisi yang ada pada buku pedoman Susenas 2018. Tulisan ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Berisikan latar belakang, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan publikasi.

Bab II. Metodologi

Berisikan tentang sumber data yang disajikan, metode pengumpulan data, serta konsep dan definisi yang digunakan.

Bab III. Partisipasi Pendidikan

Berisikan pembahasan mengenai partisipasi sekolah dari anak usia dini maupun tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Flores Timur.

Bab IV. Pembangunan Pendidikan

Berisikan pembahasan mengenai angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah serta tingkat pendidikan tertinggi di Kabupaten Flores Timur.

Bab V. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berisikan pembahasan mengenai fasilitas pendidikan dan tenaga guru di Kabupaten Flores Timur.

<https://florestimurkab.bps.go.id>



BAB II METODOLOGI

<https://www.studycart24.com/ab/bps-go.id>

BAB II

METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan publikasi Profil Pendidikan Kabupaten Flores Timur 2018 ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang menjadi bahan utama dalam kajian ini bersumber dari hasil pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 (Susenas 2018). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas/instansi lain.

Salah satu sumber data utama yang digunakan dalam pembuatan publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018. Susenas merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait. Cakupan data Susenas berbasis pada survei langsung ke masyarakat. Kekayaan data pada Susenas membuat banyak lembaga baik dalam maupun luar negeri yang memanfaatkan hasil Susenas sebagai bahan evaluasi, monitoring dan perencanaan kegiatan.

Untuk kepentingan publikasi ini data yang digunakan adalah data Susenas mengenai karakteristik rumah tangga dan anggota rumah tangga. Susenas 2018 dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan sampel sampai pada level Kabupaten/Kota. Data individu yang digunakan adalah data anggota rumah tangga yang meliputi keterangan anggota rumah tangga dan keterangan tentang kesehatan. Begitu lengkapnya data yang dihasilkan dari Susenas ini, menjadikan

Susenas merupakan survei yang paling ditunggu oleh banyak pihak. Selain dari Susenas 2018, publikasi ini juga menggunakan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur sebagai pelengkap.

2.2 Teknik Penarikan Sampel

Prosedur penarikan sampel Susenas 2018 untuk suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, memilih nh blok sensus dari Nh secara pps (*probability proportional to size*) dengan size banyaknya KK.
2. Tahap kedua, memilih sejumlah rumah tangga biasa ($m = 10$) pada setiap blok sensus terpilih secara sistematis berdasarkan hasil listing SP2010. Seluruh rumah tangga terpilih Susenas 2018 akan dicacah dengan kuesioner Kor.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret dan September. Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui dengan pasti karakteristik yang ditanyakan.

Kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan daftar VSEN18.K (untuk pengumpulan data kor) dan Daftar VSEN18.KP untuk pengumpulan data pengeluaran dan yang sekarang sudah menjadi KOR. Sedangkan modul susenas tahun 2018 adalah Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP).

2.4 Pengolahan Data

Pengolahan data, mulai dari tahap perekaman data (data entri), pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan (editing) terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dengan jawaban yang lain. Proses *data entry* yang berasal dari daftar VSEN18-K dan daftar VSEN18-KP dilakukan di BPS Kabupaten/Kota.

2.5 Konsep dan Definisi

1. Rumah tangga (biasa)

Rumah tangga (biasa) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur atau pengurusan kebutuhan bersama sehari-hari dibawah satu pengelolaan. Sedangkan orang-orang yang tinggal di asrama, lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan dan sejenisnya dimana pengurusan kebutuhan sehari-hari diatur oleh suatu lembaga, badan, yayasan dan sebagainya; atau sekelompok orang yang indekost (berjumlah 10 orang atau lebih) dikategorikan sebagai rumah tangga khusus.

2. Anggota rumah tangga

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya tinggal disuatu tempat atau rumah tangga selama 6 bulan atau lebih, atau yang belum 6 bulan namun berniat untuk menetap. Untuk selanjutnya anggota rumah tangga dalam publikasi ini akan disebut juga penduduk.

3. Umur penduduk

Umur penduduk dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir.

4. Keterangan Pendidikan

Keterangan pendidikan yang dimaksud meliputi angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki, dan persentase penduduk yang buta huruf. Seseorang dikatakan bersekolah apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, maupun non formal (Paket A,B,C) baik yang dibawah pengawasan Depdiknas maupun departemen/instansi lain.

Jenjang pendidikan formal terdiri dari :

a) *Jenjang Pendidikan Dasar* meliputi Sekolah Dasar (SD) termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) umum/kejuruan (termasuk SMP terbuka, SMEP, ST, SKKP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

b) *Jenjang Pendidikan Menengah* meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh Kementerian selain Kemendikbud), dan MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan).

c) *Jenjang Pendidikan Tinggi* meliputi :

- Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang termasuk program pendidikan akademik antara lain program sarjana (S1), magister (S2), dan doctor (S3). Lulusan program-program tersebut berhak menggunakan gelar sarjana, magister, atau doktor.

- Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program pendidikan vokasi antara lain program diploma {(Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), dan Diploma Empat (D4) atau sarjana terapan)}, magister terapan, dan doktor terapan. Lulusan-lulusan program pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.

- Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi (keahlian lanjutan) antara lain program profesi dan program spesialis. Program profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, akuntan, notaris, psikolog, guru/pendidik, dan wartawan. Sedangkan program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan antara lain program dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur professional pratama, madya, dan utama, sesuai ketentuan yang berlaku. Lulusan program pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi atau spesialis.

Jenjang pendidikan nonformal yang dicakup dalam Susenas hanya pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang mencakup program paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs, dan paket C setara SMA/MA (UU No.20 tahun 2003 pasal 26). Paket A/B/C merupakan pendidikan kesetaraan dengan tujuan memperluas akses pendidikan dasar Sembilan tahun melalui program paket A dan paket B serta pendidikan menengah melalui program paket C. Penyelenggara menerapkan prinsip belajar oleh/dari untuk masyarakat dengan memberdayakan peran masyarakat.

5. Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

- Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal, maupun non formal (Paket A,B,C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar;
- Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, maupun non formal (Paket A,B,C) yang berada di bawah pengawasan Kemendiknas, Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta;

Catatan :

- * Bagi mahasiswa yang sedang cuti dinyatakan **masih** bersekolah.
- * Bagi yang sudah diterima namun belum mulai sekolah dinyatakan **masih** bersekolah.
- Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, maupun non formal (Paket A,B,C) tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif.

Catatan :

- * Program Diploma I hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

6. Jenjang Pendidikan Tertinggi

Jenjang pendidikan tertinggi adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

7. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

SD/MI adalah Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong);

8. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/sederajat/kejuruan

SMP/MTs adalah Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat {MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Keterampilan Kejuruan, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan Guru Agama (PGA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama};

9. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat

SMA/MA adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA);

10. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

SMK adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen;

11. Program D.I/II adalah program D.I/II pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal;

12. Program D.III adalah program D.III atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda;

Contoh:

- Akademi Seni Musik Indonesia
- Akademi Seni Tari Indonesia
- Akademi Bahasa Asing
- Akademi Pimpinan Perusahaan
- Akademi Kimia Analis
- Akademi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

13. Program D.IV/S1

Program DIV/S1 adalah program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi;

14. S2/S3

S2/S3 adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

Catatan :

- * Bagi mereka yang bersekolah di dua sekolah (atau lebih) dicatat pada salah satu saja.

Contoh:

Anak yang bersekolah di SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah akan dicatat di SD atau Madrasah Ibtidaiyah, tergantung jawaban responden.

- * Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2 dan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

15. Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki terdiri dari:

- a.)** Tidak punya ijazah SD dan sederajat adalah mereka yang tidak memiliki ijazah SD/MI/Sederajat. Mereka pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, Paket A1-A100, Paket A Setara) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga mereka yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat;
- b.)** SD adalah tamat Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, atau Paket A1-A100);
- c.)** Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah tamat Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat dengan Sekolah Dasar;
- d.)** Paket A adalah tamat mengikuti ujian Paket A yang diselenggarakan oleh Kemendiknas;
- e.)** SMP Umum/Kejuruan adalah tamat Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, atau yang sederajat, MULU, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Keterampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB),

Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama;

- f.)** Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah tamat Madrasah Tsanawiyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama;
- g.)** Paket B adalah tamat mengikuti ujian Paket B yang diselenggarakan oleh Kemendiknas;
- h.)** SMA/ sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas);
- i.)** Madrasah Aliyah (MA) adalah tamat Madrasah Aliyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas;
- j.)** SMK adalah tamat sekolah kejuruan setingkat dengan Sekolah Menengah Atas;
- k.)** Paket C adalah tamat mengikuti ujian Paket C yang diselenggarakan oleh Kemendiknas;
- l.)** Diploma I/II adalah tamat program DI/DII pada suatu lembaga pendidikan formal yang khusus diberikan untuk program diploma;
- m.)** Diploma III/Sarjana Muda adalah yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu perguruan tinggi;
- n.)** Diploma IV/S1 adalah tamat program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi;

- o.) S2/S3 adalah tamat program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

16. Angka Melek Huruf (AMH)

AMH merupakan tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Di mana AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan di bidang pendidikan. AMH adalah proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya.

Huruf latin, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin;
Huruf lainnya, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misal huruf arab, cina dan sebagainya;

Huruf latin dan huruf lainnya, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Tidak dapat membaca dan menulis, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Catatan:

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.
2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.

3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

17. Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS)

RLS/MYS adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

18. Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat Partisipasi Sekolah merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk usia 7-12 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk usia 13-15 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk usia 16-18 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.

19. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.

20. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

- APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Dasar dan sederajat (SD) terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
- APK SLTP merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat (SLTP) terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
- APK SMU/K merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Menengah Umum/Kejuruan dan sederajat (SMU/K) terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

21. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

- APM SD merupakan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di Sekolah Dasar dan sederajat (SD) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun.
- APM SMP merupakan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat (SLTP) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun.
- APM SMA merupakan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan sederajat (SMA/K) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun.



BAB III

PARTISIPASI

PENDIDIKAN

<http://presidensial.go.id>

BAB III

PARTISIPASI PENDIDIKAN

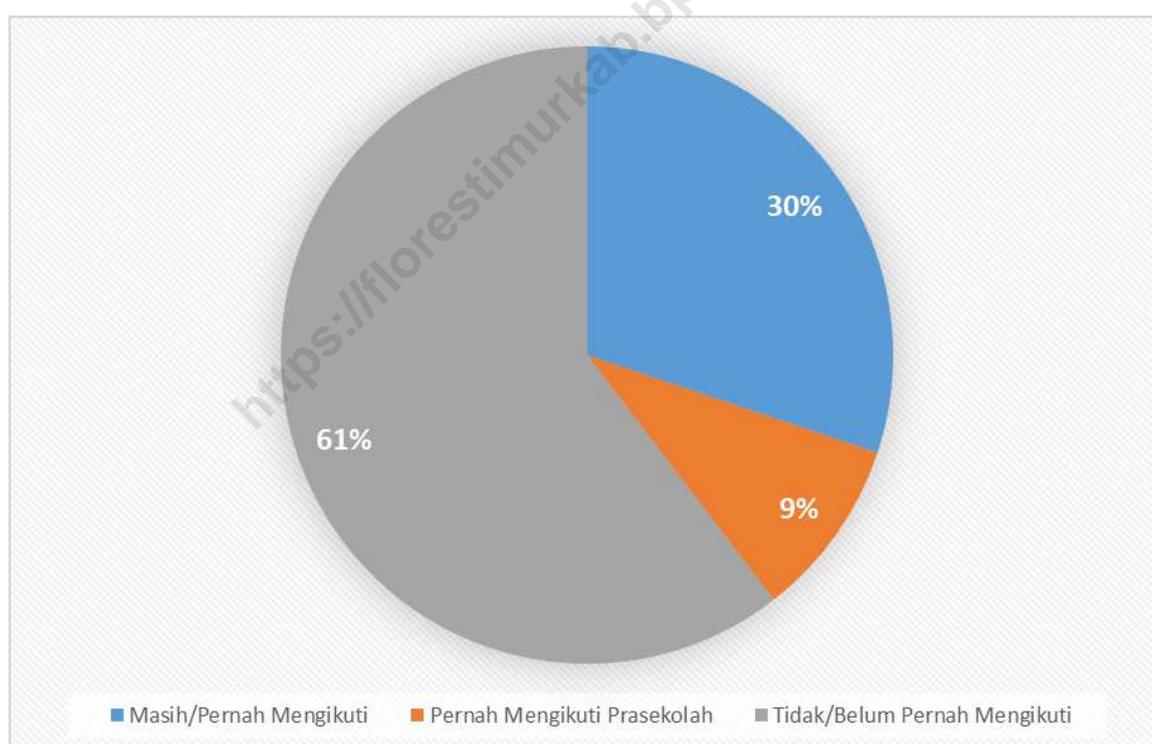
Pendidikan merupakan hal pokok dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang sebagaimana salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pembuat kebijakan suatu daerah harus memperhatikan keadilan dan pemerataan warganya untuk memperoleh pendidikan.

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU Sisdiknas Pasal 1 no.16). Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan pada jalur formal, non formal, maupun informal. Pada jalur formal, pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) atau

Raudhatul Athfal (RA). Pendidikan yang diberikan pada anak usia dini baik di Pos PAUD, Kelompok Bermain (KB), maupun Taman Kanak-kanak (TK) dimaksudkan untuk membantu anak mencapai tahap perkembangannya secara optimal dan disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Stimulus-stimulus yang diberikan seharusnya dapat mengembangkan aspek perkembangan anak secara keseluruhan yang meliputi aspek kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan fisik motorik.

Gambar 3.1 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Partisipasi Pra Sekolah Tahun 2018

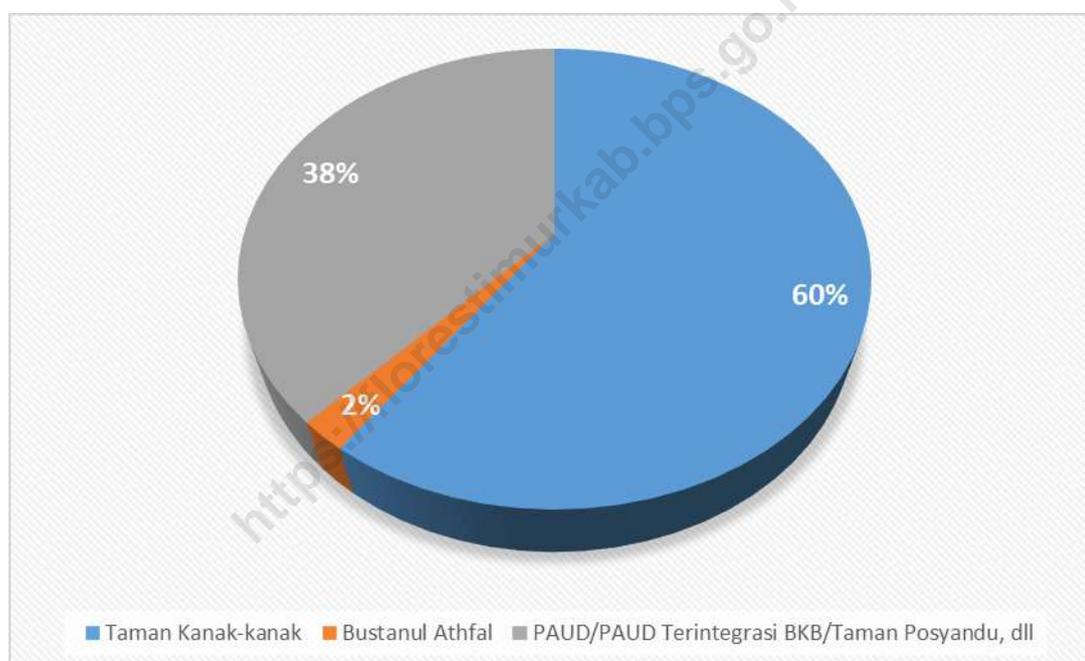


Sumber: Susenas 2018

Dari gambar 3.1 dapat kita ketahui bahwa di tahun 2018 sebagian besar penduduk berumur 0-6 tahun belum/tidak pernah mengikuti pendidikan pra sekolah. Dari keseluruhan penduduk berumur 0-6 tahun hanya terdapat sekitar 30% yang masih mengikuti pendidikan pra sekolah dan sekitar 9% pernah

mengikuti di tahun ajaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pra sekolah di Kabupaten Flores Timur masih kurang. Kurangnya partisipasi pendidikan pra sekolah dapat disebabkan oleh berbagai hal. Oleh karena itu pemerintah harus lebih jeli dalam merumuskan kebijakan terkait pendidikan pra sekolah.

Gambar 3.2 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Jenis Pendidikan Prasekolah, 2018



Sumber: Susenas 2018

Dari gambar 3.2 dapat kita ketahui bahwa presentase partisipasi pendidikan prasekolah terbanyak di Kabupaten Flores Timur adalah taman kanak-kanak yang sebanyak 60%. Sementara penduduk 0-6 tahun yang mengikuti PAUD ada sebanyak 38%. Sedangkan 2% sisanya mengikuti Bustanul Athfal.

3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Umur 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Dan Jenis Kelamin Tahun 2018

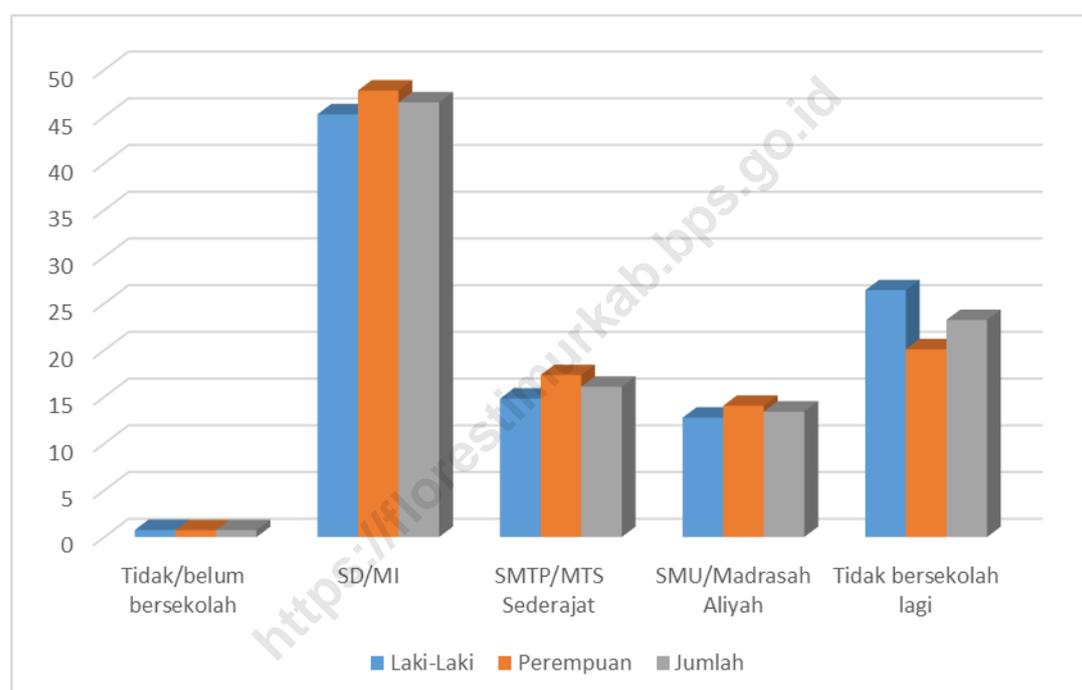
Status Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Tidak/Belum Pernah Sekolah	0.75	0.74	0.74
02. Masih Sekolah	72.84	79.17	76.03
03. Tidak Bersekolah Lagi	26.41	20.09	23.23
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2018

Upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan meningkatkan akses terhadap fasilitas pendidikan, sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pada tahun 2018, dari kelompok penduduk umur 7-24 tahun, 0.74 persen di antaranya Tidak/ Belum Pernah Sekolah. 76.03

persen Sedang Bersekolah dan 23.23 persen Sudah Tidak Bersekolah Lagi. Pada kelompok umur 7-24, sekitar 46.52 persen memiliki pendidikan tertinggi SD/MI, 16.08 persen berpendidikan tertinggi SMP/MTS dan 13.42 persen berpendidikan tertinggi SMA/MA.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Umur 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Dan Jenis Kelamin Tahun 2018



Sumber: Susenas 2018

3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu atau angka partisipasi sekolah (APS). Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap

jenjang sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan antar daerah.

Tabel 3.2 APS Formal dan Non Formal Penduduk Umur 5-18 Tahun Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin Tahun 2018

APS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
5-6 Tahun	33,92	16,64	25,71
7-12 Tahun	99,63	99,68	99,66
13-15 Tahun	87,88	97,91	92,61
16-18 Tahun	75,12	67,96	71,52

Sumber: Susenas 2018

Dari tabel 3.3 dapat kita ketahui bahwa APS penduduk umur 5-6 tahun adalah 25,71%, kemudian penduduk umur 7-12 tahun adalah 99,66%, sementara penduduk umur 13-15 dan 16-18 tahun masing masing 92,61% dan 71,52%. Tingginya APS pada dua kelompok umur, 7-12 tahun dan 13-15, dalam bersekolah merupakan salah satu contoh dampak positif adanya kebijakan pemerintah

tentang wajib belajar sembilan tahun yang sudah dilaksanakan selama dua dekade terakhir.

Jika diperhatikan lebih lanjut, semakin tinggi kelompok umur, maka APS akan semakin mengecil. Melalui fenomena ini juga terlihat bagaimana umur sebagai salah satu karakteristik demografis ternyata dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi lebih karena semakin meningkatnya umur penduduk, maka kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin terbatas, baik dalam hal biaya, akses, maupun kemampuan akademis.

3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti. APK SD diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa SD dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun. APK SMP diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa SMP dengan jumlah penduduk umur 13-15 tahun. APK SMA diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa SMA dengan jumlah penduduk umur 16-18 tahun. APK PT diperoleh dengan membandingkan jumlah mahasiswa dengan jumlah penduduk umur 19-24 tahun.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin di Flores Timur Tahun 2018

Status Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. SD	128.05	114.36	119.10
02. SMP	69.24	91.82	79.89
03. SMA	81.09	67.54	74.29

Sumber: Susenas 2018

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa bahwa APK 7-12 tahun secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan, nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa murid SD selain mencakup anak yang berusia 7-12 tahun juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan juga lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak anak yang terlambat masuk SD atau sebaliknya sangat dini (belum cukup umur) untuk bersekolah SD, atau masih ada murid SD yang tinggal kelas.

Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, APKnya cenderung menurun. Hal ini terjadi disebabkan salah satunya yaitu ketika semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar juga peluang untuk putus sekolah, dimana ketika merasa tingkat pendidikannya sudah cukup maka lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah.

3.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain indikator APS dan APK, partisipasi sekolah juga dapat ditinjau melalui Angka Partisipasi Murni (APM). Berbeda dari APK yang mengukur daya serap jenjang pendidikan tanpa memperhitungkan batasan usia anak sekolah, APM mengukur ketepatan usia penduduk dalam jenjang pendidikan tertentu. Pola yang ditunjukkan oleh nilai APM tidak jauh berbeda seperti yang ditunjukkan oleh nilai APK, yakni pada jenjang SD/ sederajat nilainya lebih tinggi, kemudian semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

APM adalah persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu satuan pendidikan yang bersangkutan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, apabila dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM SD diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa SD umur 7-12 tahun dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun. APM SMP diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa SMP umur 13-15 tahun dengan jumlah penduduk umur 13-15 tahun. APM SMA diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa SMA umur 16-18 dengan jumlah penduduk umur 16-18 tahun.

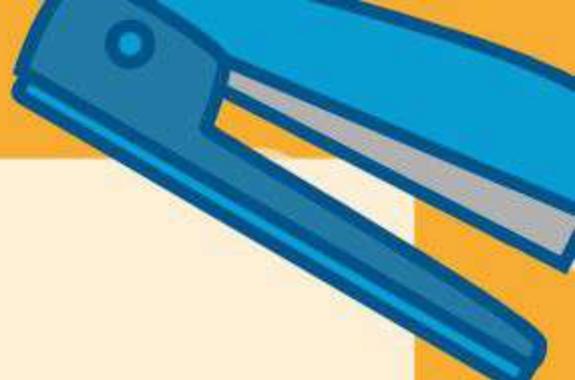
Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Flores Timur Tahun 2018

Status Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. SD	99.63	95.09	97.19
02. SMP	55.71	70.35	62.62
03. SMA	60.68	56.52	58.59

Sumber: Susenas 2018

Dari tabel 3.5 dapat kita ketahui bahwa APM SD di Kabupaten Flores Timur mencapai 97,19%. Hal ini berarti dari 100 penduduk berumur 7-12 tahun terdapat sekitar 97 orang yang bersekolah di SD. Sedangkan APM untuk SMP dan SMA masing-masing besarnya 62,62% dan 58,59%.

Jika dibandingkan dengan Tabel 3.4, maka berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa APM Kabupaten Flores Timur cenderung lebih rendah daripada APK Kabupaten Flores Timur. Ini dapat disebabkan salah satunya karena terdapat penduduk yang dalam usia sekolah namun tidak bersekolah tepat waktu. Dimana masih terdapat kasus anak yang belum cukup umur atau malah kelebihan umur di dalam suatu jenjang pendidikan. Misalnya seperti seorang anak yang berusia 15 tahun sudah masuk SMA, atau anak yang usia 20 tahun tetapi masih duduk di bangku SMA.



BAB IV
PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN

<http://www.pustaka.kemdiknas.go.id>

BAB IV

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa (termasuk di dalamnya pembangunan pada lingkup kabupaten/kota) adalah suatu keniscayaan, melalui pendidikan bermutu dapat dilahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu input proses pembangunan. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

4.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Pada tingkat makro, tingkat pendidikan dapat dilihat dari kemampuan baca tulis penduduk dewasa (umur 15 tahun ke atas). Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar setidaknya memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tinggi rendahnya angka melek huruf suatu masyarakat mencerminkan kualitas pendidikan masyarakat tersebut. Selain itu, salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf.

Angka melek huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (berdasarkan standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen mencerminkan semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kemampuan Baca Tulis	Laki-Laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
Huruf Latin	97,72	94,03	95,87
Huruf Lainnya	7,06	4,98	6,02
Melek Huruf	97,72	94,12	95,78

Sumber: Susenas 2018

Dari tabel 4.1 dapat kita ketahui bahwa Pada tahun 2018 angka melek huruf Latin penduduk Flores Timur telah mencapai 95,78 persen. Angka Melek Huruf berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki mencapai 97,72 persen, sedangkan untuk perempuan agak lebih rendah, yakni 94,12 persen. Secara umum angka melek huruf di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 cenderung meningkat dari tahun 2017, baik pada laki-laki, perempuan maupun secara total. Jika melihat angka buta huruf Kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 cenderung turun dari tahun 2017.

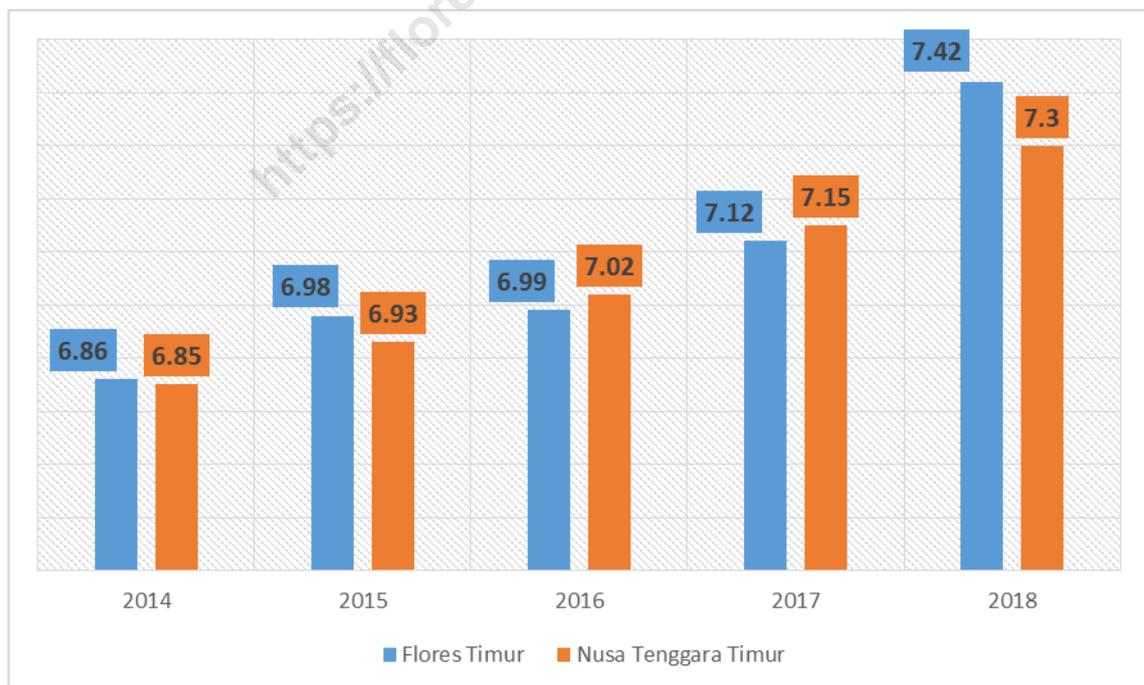
4.2 Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Komponen pembentuk indikator IPM ada 4 yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama sekolah serta Pengeluaran per Kapita.

Rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD/MI adalah 6 tahun, tamat SLTP/MTs adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 4.1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas Tahun 2014-2018



Sumber: Susenas 2014-2018

Dari gambar 4.1 dapat kita ketahui bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Flores Timur terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas hanya mencapai 7,42 tahun, artinya bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Flores Timur baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 1 SMP atau putus sekolah di kelas 2 SMP.

Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 menunjukkan sumber daya manusia di Kabupaten Flores Timur masih tergolong rendah. Meskipun mengalami kenaikan angka rata-rata lama sekolah, namun kenaikannya dari tahun 2014 hingga ke 2018 hanya pada satu tingkat saja. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dari pemerintah agar merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Flores Timur khususnya dari bidang pendidikan.

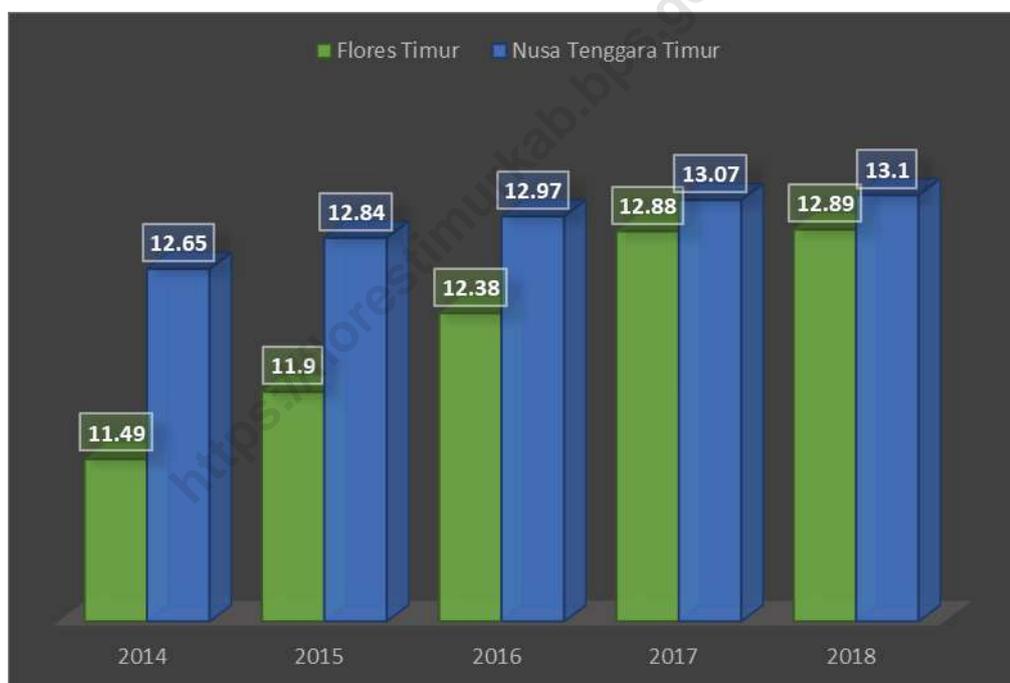
Rata-rata lama sekolah merupakan cerminan dari partisipasi sekolah penduduk atas setiap jenjang pendidikan. Meningkatnya rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir ini menggambarkan bahwa kesempatan penduduk Kabupaten Flores Timur untuk memperoleh pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika rata-rata sekolah dapat terus ditingkatkan, diharapkan sasaran pembangunan pendidikan dapat tercapai, karena angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penilaian angka IPM.

4.3 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di

masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator baru yang diterapkan untuk penghitungan IPM dengan metode baru. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Gambar 4.2 Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2014-2018



Sumber: Susenas 2014-2018

Dari gambar 4.2 dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2014 hingga 2018, angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Flores Timur selalu mengalami kenaikan. Tahun 2018 angka harapan lama sekolah sebesar 12,89. Hal ini memiliki arti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga 12 tahun atau setara dengan lulus SMA atau D1.

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Flores Timur mengindikasikan bahwa kesempatan penduduk untuk bersekolah menjadi semakin tinggi dari tahun ke tahun.

4.4 Pendidikan Yang Ditamatkan

Selain angka melek huruf, salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Dimana semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik juga kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Tingkat pendidikan tertinggi bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pendidikan di suatu daerah, serta berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu daerah. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Umur 7-24 Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2018

Pendidikan Tertinggi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak/belum bersekolah	0.75	0.73	0.74
2. SD/MI	45.24	47.79	46.52
3. SMTP/MTS Sederajat Kejuruan	14.82	17.33	16.08
4. SMU/Madrasah Aliyah	12.78	14.05	13.42
5. Tidak bersekolah lagi	26.41	20.09	23.23

Sumber : Susenas 2018



BAB V

SARANA & PRASARANA PENDIDIKAN

<https://resistor.kab.go.id>



BAB V

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

5.1 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Guru

Tersedianya fasilitas pendidikan yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional di bidang pendidikan. Oleh karena itu pemerintah fokus untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas layanan pendidikan diantaranya rasio pendidik-sekolah, rasio siswa-sekolah, dan rasio siswa-pendidik.

Dengan kondisi penduduk selalu meningkat setiap tahunnya serta tuntutan akan derajat pendidikan yang tinggi, idealnya diimbangi dengan peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan. Tabel 5.1 akan memberikan gambaran kondisi fasilitas dan tenaga kependidikan pada tahun 2018.

Tabel 5.1 Jumlah Sekolah, Jumlah Tenaga Pendidik, dan Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018

Status Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Pendidik	Jumlah Siswa
(1)	(2)	(3)	(4)
01.SD	280	2.809	32.961
02.SMP	63	1.070	14.158
03.SMA dan SMK	36	955	10.818

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Flores Timur

Tabel 5.2 Rasio Pendidik-Sekolah, Rasio Siswa-Sekolah, Dan Rasio Siswa-Pendidik Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018

Status Pendidikan	Rasio		
	Pendidik-Sekolah	Siswa-Sekolah	Siswa-Pendidik
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	10	108	18
SMP	17	225	13
SMA dan SMK	27	301	11

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Flores Timur

Rasio pendidik-sekolah merupakan perbandingan antara jumlah pendidik dan sekolah di setiap jenjang pendidikannya. Rasio pendidik-sekolah ini memberikan gambaran rata-rata jumlah guru di setiap sekolah. Dimana semakin besar angkanya maka semakin banyak rata-rata guru di suatu sekolah. Jika dilihat

dari Tabel 5.2, rasio pendidik-sekolah untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar 10 yang berarti setiap sekolah dasar yang berada di Kabupaten Flores Timur, memiliki rata-rata tenaga pendidik sebanyak 10 orang.

Selanjutnya rasio siswa sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa dan sekolah di setiap jenjang pendidikannya. Dimana angka ini memberikan gambaran kepadatan sekolah di setiap jenjang pendidikan. Dimana semakin besar angkanya maka semakin padat siswa dalam sekolah tersebut. Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa rasio siswa-sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas sebesar 301 yang berarti rata-rata terdapat 301 siswa dalam setiap Sekolah Menengah Atas yang berada di Kabupaten Flores Timur.

Yang terakhir adalah rasio siswa-pendidik yang merupakan perbandingan antara jumlah siswa dan pendidik. Dimana angka ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Semakin tinggi angkanya berarti semakin banyak juga siswa yang diajar oleh seorang guru, ketika jumlah siswa yang diajar semakin banyak maka dikhawatirkan kualitas pengajaran menjadi semakin berkurang. Dari Tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa rasio siswa-pendidik untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama sebesar 13, yang berarti setiap guru SMP di Kabupaten Flores Timur mengajar 13 orang siswa. Atau dengan kata lain seorang guru SMP di Kabupaten Flores Timur mengawasi 13 orang siswa.

<https://florestimurkab.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Jl. San Juan, Sarotari Tengah, Larantuka,
86219 Telp (0383) 21164, Faks (0383) 21164,
e-mail : bps5309@bps.go.id

ISBN 978-602-5461-31-6



9 786025 461316